



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Reses Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDP dan RDPU
Dengan	: 1. Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN; 2. Gerakan Bersama (GEBER) Buruh/Pekerja di BUMN.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 23 April 2014
Pukul	: 12.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan Ketua Satuan Tugas mengenai Penyelesaian Permasalahan Outsourcing
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI B. Pengarah dan Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN beserta jajaran; C. Gerakan Bersama (GEBER) Buruh/Pekerja di BUMN.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN dan Gerakan Bersama (GEBER) Buruh/Pekerja di BUMN, dibuka pukul 14.00 WIB oleh dr. Ribka Tjiptaning, setelah kuorum

terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Satuan Tugas (Satgas) Outsourcing BUMN untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) dengan melaksanakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans RI dan Menteri BUMN RI, tanggal 4 Maret 2014 secara nyata sesuai waktunya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Menakertrans RI dan Menteri BUMN memberikan kewenangan kepada Satgas Outsourcing BUMN untuk dapat mengeksekusi kesimpulan rapat kerja, 4 Maret 2014, sesuai target waktu, verifikasi 12 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014 dan selanjutnya 12 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan outsourcing telah diselesaikan.
3. Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Rapat Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk membahas audit kinerja khusus dalam konteks ketenagakerjaan di lingkungan BUMN.
4. Komisi IX DPR RI meminta Satgas Outsourcing BUMN melibatkan serikat pekerja outsourcing BUMN (GEBER BUMN) dan / atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing dalam setiap proses penyelesaian masalah outsourcing.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI dan Menteri BUMN RI untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan direktur utama perusahaan di lingkungan BUMN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di daerah untuk menghentikan proses PHK pekerja outsourcing dengan alasan apapun.

Rapat diakhiri pukul 16.40 WIB

KETUA RAPAT,


dr. RIBKA TJIPTANING